

Analisis Perkembangan dan Tren Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Periode Tahun 2020-2024

Faza Aisyi¹, Luqita Romaisyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Akuntansi

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik periode 2020–2024 berdasarkan empat komponennya: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui analisis data BPPKAD serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan fluktuasi PAD, termasuk penurunan pada 2023 sebesar -1,74% dan kenaikan signifikan pada 2024 sebesar 18,28%. Pajak daerah memberi kontribusi terbesar dengan kenaikan stabil, sedangkan retribusi, HPKD, dan lain-lain PAD dipengaruhi dinamika ekonomi. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi, HPKD, Kabupaten Gresik

Abstract

This study analyzes the trend of Gresik Regency's Original Regional Revenue (PAD) for the 2020–2024 period based on four components: regional taxes, regional levies, proceeds from the management of separated regional assets, and other legitimate PAD. A qualitative, descriptive analysis approach was used through BPPKAD data and interviews. The results show fluctuations in PAD, including a decrease in 2023 of -1.74% and a significant increase in 2024 of 18.28%. Regional taxes contributed the largest with a stable increase, while levies, HPKD, and other PAD influenced economic dynamics. These findings emphasize the need to strengthen regional revenue intensification and extensification strategies.

Keywords: Regional Original Income, Regional Taxes, Retributions, HPKD, Gresik Regency

Copyright (c) 2025 **Faza Aisyi¹**

✉ Corresponding author :

Email Address : fazaaisyi78@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap tahun, volume pembangunan di suatu daerah cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini biasanya diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan dalam pola kebutuhan hidup masyarakat. Fenomena ini menjadi sebuah tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan peran aktif dan berkesinambungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harusnya tidak hanya berfokus pada penyediaan pelayanan publik, tetapi juga berupaya merombak berbagai segi kehidupan masyarakat dengan meniadakan ketimpangan, mengurangi

ketidakmerataan, dan menghalau kemiskinan yang absolut guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik (Damanik, 2019).

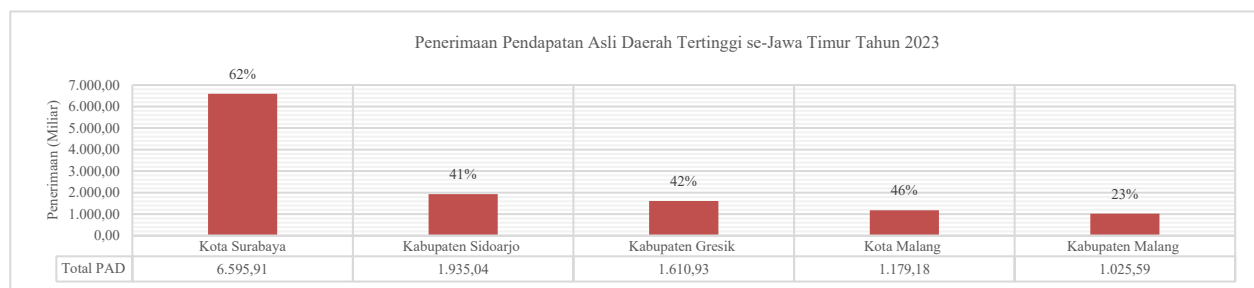
Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran guna meningkatkan potensi yang ada. Dikarenakan sejak berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan membiayai, mengelola, serta mengatur pemerintahannya sendiri (Siahaan, 2016). Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri guna membiayai pembangunan maupun pelayanan publik di daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis utama yakni : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini dikarenakan PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Selain itu, PAD juga menjadi parameter mengenai sejauh mana kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017). Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandiriannya. Menurut (Firdausy, 2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan baik apabila memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya sebesar persentase pencapaiannya melebihi 70% dari total penerimaan yang bersumber dari PAD. Untuk itu pemerintah daerah tetap harus berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Kabupaten Gresik, tercatat memiliki penerimaan PAD yang tinggi. Kabupaten Gresik termasuk dalam lima besar PAD tertinggi pada tahun 2023 se-Jawa Timur. Hal ini dilansir dari website mauli.id. Kabupaten Gresik menjadi urutan ketiga dengan rasio PAD yang hampir sama dengan Kabupaten Sidoarjo, yakni sebesar 42%. Namun, Jumlah PAD Gresik pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.610,93 miliar rupiah, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan PAD Sidoarjo. Terlihat dari gambar 1 dibawah ini.

Gambar. 1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi Tahun 2023



Sumber : Diolah peneliti dari website

Gresik mendapat julukan sebagai “Kota Industri” karena menjadi salah satu daerah dengan kontribusi industri terbesar di Jawa Timur. Banyak potensi penerimaan yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik bersumber dari keberadaan berbagai industri besar seperti PT Kelola Mina Laut, PT Wilmar Nabati Indonesia, Nippon Paint, serta kawasan industri modern Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE). Selain sektor industri, Gresik juga mulai mengembangkan sektor pariwisata dan jasa, yang ditandai dengan adanya pemanfaatan infrastruktur lama menjadi area komersial seperti tempat rekreasi, restoran, dan kafe. Salah satu contohnya adalah perumahan dinas milik PT Semen Indonesia yang kini dialihfungsikan menjadi restoran, berlokasi di Jl. Nasrun Baru dan Jl. Awikoen, Kecamatan Gresik. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan PAD Kabupaten Gresik tidak hanya bersumber dari sektor industri, tetapi juga mulai meluas ke sektor jasa dan pariwisata yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu tren penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gresik berdasarkan masing-masing komponennya. Menurut (Bungin, 2007), format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena sosial di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Menurutnya, format deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, bukan kedalaman data ataupun makna data. Metode kualitatif digunakan untuk memahami kondisi yang sesungguhnya di lapangan, melalui pengumpulan data berupa dokumen, wawancara, dan observasi yang relevan.

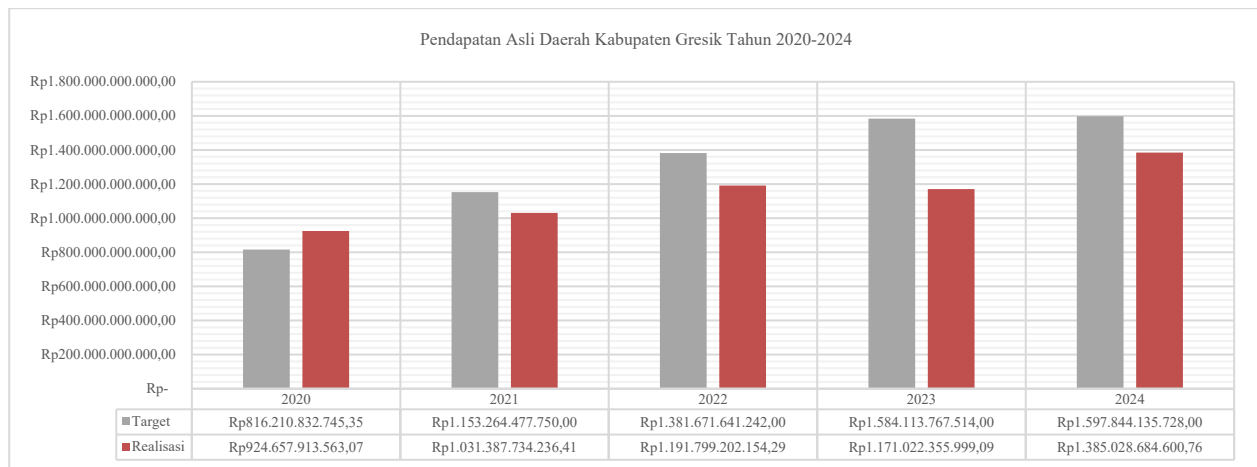
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan target dan realisasi pendapatan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen resmi pemerintah Kabupaten Gresik lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik periode tahun 2020 hingga 2024 masih mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2023, mengalami penurunan sekitar 1.74% atau sebesar Rp 1.171.022.355.999,09 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.191.799.202.154,29. Selanjutnya pada tahun 2024 penerimaan PAD meningkat sekitar 18.27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Periode Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah peneliti dari BPPKAD Kabupaten Gresik

Selanjutnya pada gambar 2 tercantum mengenai target dan realisasi yang seharusnya dicapai oleh Kabupaten Gresik. Terlihat bahwa target PAD Kabupaten Gresik pada setiap tahunnya selalu meningkat. Namun, perlu diketahui bahwa beberapa realisasi dari setiap komponen PAD tidak selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Contohnya pada tahun 2021, realisasi PAD lebih rendah daripada target yang ditetapkan. Selisishnya mencapai Rp. 121.876.743.513,59 atau bisa disebutkan bahwa pencapaian realisasi hanya 89.43%.

Pada tahun 2022, mengalami penurunan yang cukup signifikan dari penetapan target. Realisasi penerimaan mencapai 86.26% dan selisihnya mencapai Rp. 189.872.439.087,71. Hal ini juga terjadi lagi pada tahun 2023 yang penurunannya lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.584.113.767.514,00 namun realisasinya hanya sebesar Rp. 1.171.022.355.999,09. Artinya pencapaian realisasi hanya sebesar 73.92%.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio pertumbuhan menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Indikator ini membantu mengidentifikasi apakah pemerintah daerah berhasil meningkatkan penerimaan lokalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bila persentasenya meningkat, maka pengelolaan pendapatan daerah dianggap semakin efektif (Sularso & Restianto, 2011). Metode penghitungan rasio pertumbuhan dilakukan dengan membandingkan selisih pendapatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya terhadap pendapatan tahun sebelumnya. Hasil yang bernilai positif menunjukkan adanya kenaikan PAD, sedangkan hasil yang bernilai negatif menandakan terjadinya penurunan yang perlu mendapat tindak lanjut evaluatif. Tabel 1 berikut menyajikan perhitungan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik untuk Tahun Anggaran 2020-2024.

Tabel. 1 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Periode Tahun 2020 - 2024

Tahun	Total PAD (Rupiah)	Pertumbuhan PAD (%)
2020	924.657.913.563,07	-
2021	1.031.387.734.236,41	11.54%
2022	1.191.799.202.154,29	15.55%
2023	1.171.022.355.999,09	-1.74%
2024	1.385.028.684.600,76	18.28%

Sumber : Diolah peneliti dari BPPKAD Kabupaten Gresik

Dari perhitungan yang diperoleh pada Tabel 1, menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik pada tahun 2020 hingga 2024 masih mengindikasikan adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, PAD mencatat pertumbuhan sebesar 11.54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan local. Pertumbuhan kembali menguat pada 2022 dengan kenaikan 15.55%. Konsistensi peningkatan ini menandakan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga momentum pertumbuhan pendapatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

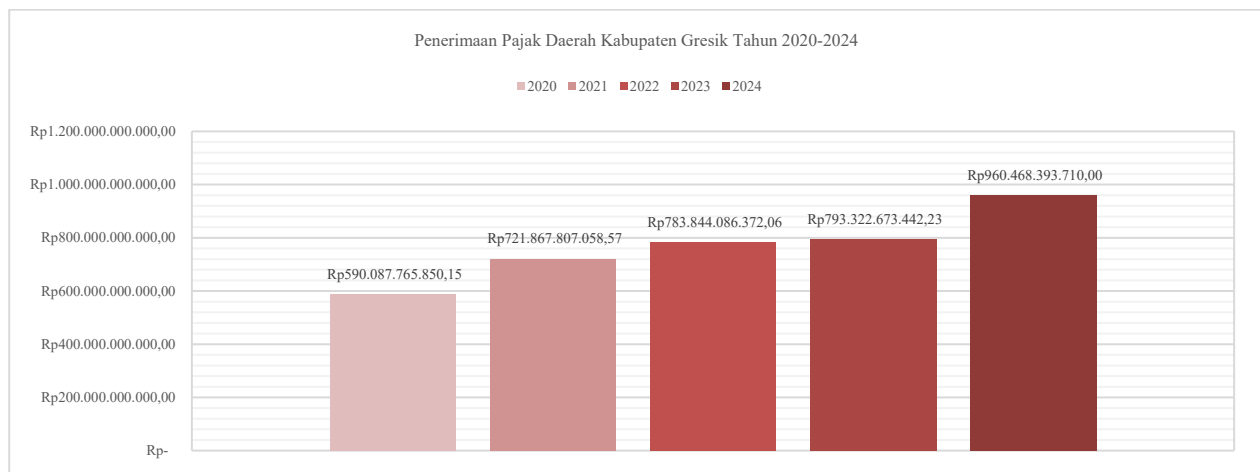
Situasi berbeda terjadi pada tahun 2023, yakni pertumbuhan PAD mengalami penurunan sebesar -1.74%. Kontraksi ini mengindikasikan adanya pelemahan kinerja pendapatan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab, seperti perlambatan aktivitas ekonomi, menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskal, atau kurang optimalnya pengelolaan perangkat pendapatan. Pemulihan kinerja terlihat kembali pada tahun 2024, di mana PAD tumbuh sebesar 18,28%, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil memperbaiki tata kelola pendapatan serta mampu merespons tantangan pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan yang tinggi tersebut juga mengarah pada adanya potensi pendapatan yang semakin besar di masa mendatang. meskipun pertumbuhan PAD mengalami fluktuasi, tren jangka panjangnya tetap menunjukkan kecenderungan positif. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat program intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan agar kemandirian fiskal dapat terus meningkat dan tetap stabil.

Analisis Komponen PAD dari Pajak Daerah

Komponen pajak daerah terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Di Kabupaten Gresik, penerimaan pajak daerah selalu meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini terlihat dalam gambar 3 yang disajikan berikut ini.

**Gambar. 3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gresik
Periode Tahun 2020-2024**



Sumber : Diolah peneliti dari BPPKAD Kabupaten Gresik

Pada tahun 2020, total penerimaan pajak daerah Kabupaten Gresik tercatat sebesar Rp. 590.088.821.868,15 (108.56%). hingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 721.867.807.058,57 (86.42%). Peningkatan pada tahun 2022 hingga 2023 cukup stabil, yakni pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 783.844.086.372,06 dan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 793.322.673.422,23. Kemudian pada tahun 2024 penerimaan pajak Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tercatat sebesar Rp. 960.468.393.710,00.

Meskipun penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, realisasi penerimaan tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan berbagai upaya guna meningkatkan penerimaan pajak daerah agar dapat memenuhi, bahkan melampaui target yang ditentukan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai gambaran umum pajak daerah. Sosialisasi ini mencakup sistem pemungutan, tata cara perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan, serta penjelasan mengenai sanksi yang diberlakukan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, seperti keterlambatan pembayaran atau manipulasi jumlah pajak.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan berbagai bentuk keringanan seperti potongan pembayaran hingga pembebasan sanksi administratif di

setiap sektor pada momen-momen tertentu. Pemerintah Kabupaten Gresik juga memberikan apresiasi secara langsung kepada wajib pajak patuh. Apresiasi ini berupa beberapa unit televisi, sepeda motor, hingga tabungan umrah. Program apresiasi ini ditujukan untuk wajib pajak atas sektor pajak konsumsi yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan pajak penerangan jalan.

Upaya lain yang dilakukan antara lain seperti pemasangan *tapping box* yang ditujukan untuk sektor hotel dan restoran untuk memantau transaksi secara transparan, bekerja sama dengan PLN dalam pengelolaan pajak penerangan jalan, serta kolaborasi dengan beberapa bank guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pembayaran pajak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga mengadakan program undian berhadiah “*Kemilau Jubung – jajan uenak bisa untung*” bagi pengunjung restoran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam program ini, pihak BPPKAD menyediakan kotak undian pada 50 restoran di Kabupaten Gresik. Undian dilaksanakan setiap bulan, mulai April hingga Desember, dengan ketentuan bahwa struk pembayaran dimasukkan ke dalam kotak undian yang telah disediakan.

Pemerintah Kabupaten Gresik juga mengadakan program *pooling PBB*. *Pooling PBB* merupakan layanan jemput bola dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditujukan bagi desa-desa dengan akses pembayaran terbatas. Program ini dinilai sangat membantu masyarakat, karena mereka dapat melakukan pembayaran pajak langsung di kantor desa setiap bulan saat kegiatan *pooling PBB* berlangsung.

Analisis Komponen PAD dari Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Retribusi daerah diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam perda Kabupaten Gresik, retribusi jasa umum tercantum dalam Perda No. 4 tahun 2011, retribusi jasa usaha dalam Perda No. 6 tahun 2011, dan retribusi perizinan tertentu dalam Perda No. 5 tahun 2011.

Di Kabupaten Gresik, hingga tahun 2024 tercatat terdapat 29 tempat yang menjadi sumber retribusi daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan retribusi Pemerintah Kabupaten Gresik diantaranya 7 (tujuh) jenis retribusi jasa umum, 8 (delapan) jenis retribusi usaha, dan 3 (tiga) jenis retribusi perizinan tertentu. Gambar 4 berikut menyajikan data realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Gresik pada periode tahun 2020 hingga 2024.

**Gambar. 4 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik
Periode Tahun 2020-2024**



Sumber : Diolah peneliti dari BPPKAD Kabupaten Gresik

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2020 total penerimaan retribusi daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 65.618.024.129,50 (105.11%). Kemudian pada tahun 2021, mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 62.608.242.760,50 (74.62%). Pada tahun 2022 penerimaan retribusi kembali meningkat signifikan, yakni tercatat sebesar Rp. 90.871.466.103,00. Namun pada tahun 2023 sedikit menurun sebesar Rp. 87.430.225.680,00. Retribusi daerah Kabupaten Gresik kembali menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2024, yaitu tercatat sebesar Rp. 401.465.003.530,69.

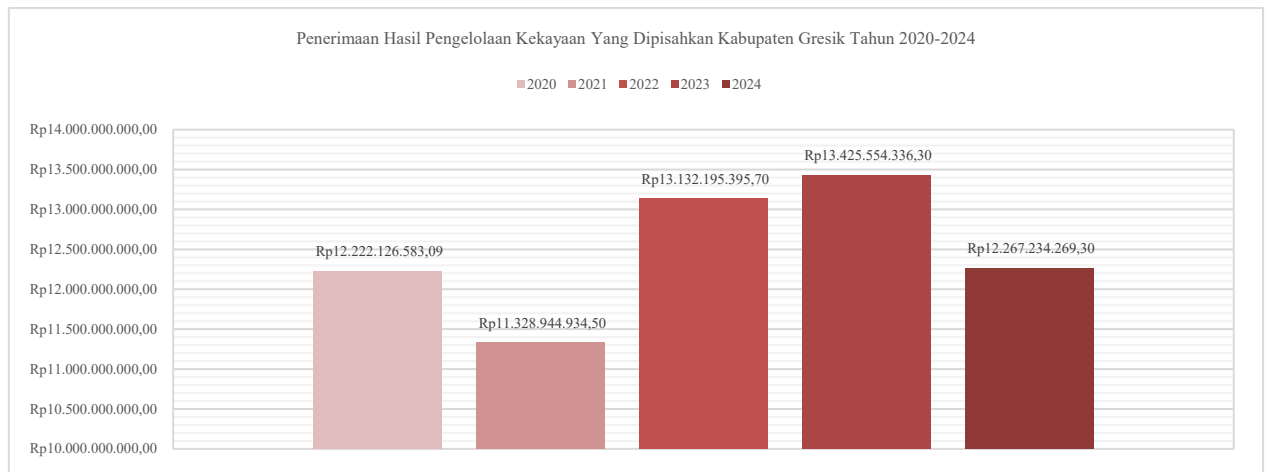
Penerimaan ini berasal dari retribusi jasa umum yang meliputi pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir tepi jalan, pelayanan pasar maupun kios. Kemudian retribusi jasa usaha meliputi pemakaian kekayaan daerah, penyewaan tanah dan bangunan, pemakaian laboratorium, pasar grosir, tempat khusus parkir, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, penyebrangan air maupun orang. Sedangkan retribusi perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Fluktuasi terkait penerimaan tersebut dapat dipengaruhi beberapa hal. Penurunan diantara tahun 2020 dan 2021 diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan keterbatasan aktivitas masyarakat. Sedangkan kenaikan sejak tahun 2023 hingga kenaikan signifikan di tahun 2024, dikarenakan aktivitas masyarakat normal kembali, selain itu terdapat beberapa bangunan baru yang berpotensi meeningkatkan penerimaan dari segi retribusi jasa umum maupun jasa usaha. Meski demikian, pengaruh terbesar adalah dari pola hidup masyarakat yang selalu mengalami perubahan.

Analisis Komponen PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal daerah pada perusahaan milik daerah (BUMD) maupun perusahaan milik pemerintah pusat/swasta. Pemerintah daerah Kabupaten Gresik mempunyai penyertaan modal pada lembaga keuangan dan aneka usaha. Hingga tahun 2024, tercatat bahwa BUMD atas lembaga keuangan di Kabupaten Gresik diantaranya Bank Gresik, Bank Jatim, dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim. Sedangkan BUMD atas aneka usaha di Kabupaten Gresik adalah PT Gresik Migas.

Gambar. 5 Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gresik Periode Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah peneliti dari BPPKAD Kabupaten Gresik

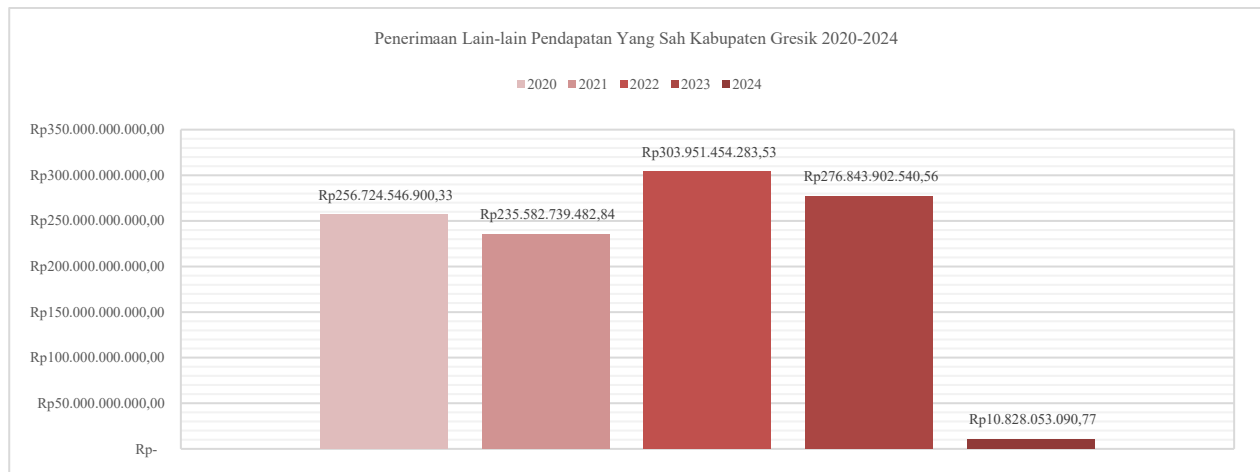
Dari gambar 5 dapat diperoleh informasi bahwa kenaikan dan penurunan penerimaan HKPD tidak teralalu signifikan. Di tahun 2020, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HKPD) Kabupaten Gresik diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD tercatat sebesar Rp. 12.222.126.583,09 (100.01%). Kemudian terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 yakni diperoleh sebesar Rp. 11.328.944.934,50 atau mencapai 95.11%. Tahun 2022 dan 2023 cenderung stabil, yakni bagian laba yang diperoleh sebesar Rp. 13.132.195.395,70 atau sekitar 96% dan Rp. 13.425.554.336,30. Namun dalam tahun 2024 penerimaan cenderung menurun, yaitu tercatat sebesar Rp. 12.267.234.269,30.

Kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bisa dikarenakan faktor kinerja keuangan BUMD meningkat. Hal ini meliputi efisiensi operasional, peningkatan pendapatan, maupun ekspansi usaha yang berhasil. Selain itu adanya kondisi ekonomi dan investasi yang kondusif. Di sisi lain, penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diakibatkan oleh masalah tata kelola, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, serta krisis ekonomi atau faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 maupun inflasi.

Analisis Komponen PAD dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas : (1) pendapatan hibah dan (2) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah akan selalu berbeda di setiap tahunnya. Di Kabupaten Gresik, penerimaan lain-lain PAD yang sah menjadi penerimaan tertinggi di urutan kedua setelah pajak daerah. Berikut disajikan data penerimaan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2020 hingga 2024 dalam Gambar 6.

Gambar. 6 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Gresik Periode Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah peneliti dari BPPKAD Kabupaten Gresik

Dari gambar yang disajikan dapat terlihat bahwa penerimaan lain-lain PAD yang sah cenderung stabil pada tahun 2020, 2021, dan 2023. Pada tahun 2020, total penerimaan lain-lain PAD yang sah tercatat sebesar Rp. 256.724.546.900,33 dan 2021 sebesar Rp. 235.582.739.482,84. Kemudian pada tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan yaitu sebesar Rp. 303.951.454.283,53. Namun, kembali menurun pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 276.843.902.540,56. Penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 10.828.053.090,77. Diperoleh informasi bahwa penurunan signifikan yang terjadi pada tahun 2024 dikarenakan penurunan pendapatan bunga atas penempatan dana pemerintah daerah.

Di Kabupaten Gresik, komponen penerimaan lain-lain PAD yang sah di setiap tahunnya cenderung stabil. Di setiap tahunnya, terdapat 10 hingga 12 komponen pembentuk lain-lain PAD yang sah. Beberapa diantaranya meliputi hasil penjualan aset daerah berupa bahan bekas bangunan, penerimaan jasa giro berupa kas daerah dan pemegang kas, pendapatan bunga deposito (dari Bank Jatim, Bank BTN, dan Bank BRI), denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan (pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman maupun sekretariat), denda pajak atas pajak hotel, air bawah tanah dan PBB-P2, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan dari pembongkaran reklame, pendapatan dari pengembalian (dari pembayaran gaji, tunjangan, dan perjalanan dinas), pendapatan dari badan layanan umum daerah dari rumah sakit umum daerah dan 17 puskesmas, pendapatan dana kapitasi pada FKTP dari 17 puskesmas, tindak lanjut penghapusan aset, dan yang terakhir pendapatan atas pelanggaran Perda/Perbup.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan dan tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik pada periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa PAD mengalami fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan tren jangka panjang menunjukkan arah yang positif.

Pada tahun 2023 PAD mengalami penurunan sebesar -1,74%, namun berhasil meningkat kembali secara signifikan pada tahun 2024 sebesar 18,28%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan pemulihan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dari sisi komponen, pajak daerah menjadi sumber PAD terbesar dan menunjukkan tren peningkatan yang stabil setiap tahun, didorong oleh berbagai program intensifikasi seperti sosialisasi, pemasangan tapping box, sinergi dengan PLN, hingga program apresiasi wajib pajak. Komponen retribusi daerah menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pandemi, dan pola aktivitas masyarakat, namun meningkat tajam pada 2024 akibat normalisasi kegiatan masyarakat dan meningkatnya fasilitas publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung stabil meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2024, yang berkaitan dengan dinamika kinerja BUMD. Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah cukup stabil hingga 2023, namun turun drastis pada 2024 karena penurunan pendapatan bunga deposito daerah.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu meningkatkan strategi penguatan basis pajak, optimalisasi aset daerah, serta diversifikasi sumber pendapatan agar kemandirian fiskal dapat terus ditingkatkan dan stabil di masa mendatang. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat diperluas dengan menambahkan variabel ekonomi makro atau faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, atau tingkat investasi sebagai pembanding untuk mengetahui faktor penyebab fluktuasi PAD secara lebih komprehensif. Selain itu, Penelitian mendatang juga dapat difokuskan pada analisis lebih mendalam terhadap setiap komponen PAD, atau melakukan perbandingan antar-daerah guna mengetahui posisi kemandirian fiskal Kabupaten Gresik secara regional.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, petunjuk, dan kemudahan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua atas doa, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada pihak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik yang telah memberikan informasi dan kesempatan wawancara yang sangat membantu dalam pengumpulan data. Selain itu, penulis juga berterima

kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga sepanjang proses penelitian berlangsung. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak.

Referensi :

- Damanik, A. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1.
- Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (pad) di provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. In *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jurnal Siasat Bisnis Universitas Islam Indonesia, Vol 1 No 7 tahun 2002.
- Kota Depok yang Mempengaruhi Otonomi Daerah", Skripsi, Institut Pertanian Bogor.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasir, M. S. (2019). ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
- Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kundhani, E. Y. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Jawa Tengah tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 37-56.
- Rachman, E. (2024). Enhancing Local Retribution as a Key Source of Local Revenue. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(1), 26-32.
- Rahdina. D.P. (2008). "Analisis Faktor-Faktor Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45.
- Setiaji, B., & Zaman, B. (2025). Efektivitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- Siregar, Baldric. (2017). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akreal). In *Upp Stim Ykpn* (Vol. 3, Nomor 2).
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Evaluasi kinerja keuangan daerah dengan pendekatan rasio keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(1), 1-12.
- Syafaruddin Alwi, 2002. Paradigma Baru Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah. yang Dipisahkan terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 150-164.